

# REFERENSI

No. 02/ref.PKA/VI/2021

**POTRET INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA**

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
BADAN KEAHLIAN - SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



# POTRET INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA

Oleh: Ade Nurul Aida

Industri pertahanan menjadi salah satu hal krusial dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara untuk menjamin kelangsungan hidup maupun eksistensi bangsa dan negara. Industri pertahanan yang kuat mempunyai dua efek utama, yakni efek langsung terhadap pembangunan kemampuan pertahanan, dan efek terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi nasional. Industri pertahanan merupakan bagian dari industri nasional yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang pembangunan kemampuan pertahanan, industri pertahanan yang kuat tercermin dari tersedianya jaminan pasokan kebutuhan alutsista serta sarana pertahanan secara berkelanjutan. Ketersediaan pasokan tersebut juga menjadi prasyarat mutlak bagi kepastian dan keleluasaan dalam menyusun rencana jangka panjang pembangunan kemampuan pertahanan, sehingga meminimalisir kekhawatiran akan faktor-faktor politik dan ekonomi, seperti embargo atau restriksi. Industri pertahanan dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi dan industri nasional, yakni ikut menggairahkan pertumbuhan industri nasional yang berskala internasional, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup signifikan, transfer teknologi yang dapat menggairahkan sektor penelitian, dan pengembangan sekaligus memenuhi kebutuhan sektor pendidikan nasional di bidang sains dan teknologi (Dephan dalam LIPI, 2012).

## **Cakupan Industri Pertahanan**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, bahwa Industri Pertahanan merupakan industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan industri pertahanan bertujuan untuk mewujudkan Industri Pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif; mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; dan meningkatkan kemampuan memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka

membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal. Dimana juga berfungsi untuk memperkuat Industri Pertahanan; mengembangkan teknologi Industri Pertahanan yang bermanfaat bagi pertahanan, keamanan, dan kepentingan masyarakat; meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; memandirikan sistem pertahanan dan keamanan negara; dan membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan.

Kelembagaan Industri Pertahanan meliputi Pemerintah, Pengguna, dan Industri Pertahanan serta hubungan kewenangan dan tanggung jawab yang dilaksanakan secara terpadu dan sinergis, yang bertanggung jawab untuk membangun kemampuan dalam menghasilkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Industri pertahanan berada di bawah pembinaan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), melalui amanat Perpres Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). KKIP yang dipimpin langsung oleh Presiden, bertugas menentukan arah strategis pembangunan industri pertahanan dalam negeri yang bersifat strategis dengan mengakomodasikan kepentingan Pengguna dan Industri Pertahanan. Selain itu, KKIP menyelenggarakan fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan. Didalamnya terdapat lima Menteri Kabinet yang terkait yaitu Menteri Pertahanan sebagai *leading* sektor, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Riset dan Teknologi, dan Menteri Keuangan.

Industri Pertahanan sendiri dikelompokkan menjadi 4 sub industri, meliputi:

- a. Industri alat utama, merupakan badan usaha milik negara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (*lead integrator*) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 menegaskan bahwa modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki negara.

**Tabel 1. BUMN Industri Alat Utama**

Industri Pertahanan	Kemampuan Produksi	Keterangan
PT. Dirgantara Indonesia	<i>Fixed Wing (Medium Heavy (CN295), Medium (CN235, N245), Light Heavy (NC212-200, NC212-400, NC212i), Far/Casr 23 Light(N219)); Rotary Wing (Heavy Heli (NAS332 Superpuma, H215, H225M), Medium Heli (Bell 412SP-HP, AS565 Panther, BELI 412 EP, AS365 Dauphin), Light Heli (BO 105 CB/CBS, AS350/AS355NP Ecureuil, AS555/AS550 Fennec).</i>	<i>Lead integrator</i> untuk pesawat tempur, pesawat terbang, atau <i>helicopter</i>

<b>PT. Pindad</b>	Senjata (ringan, Genggam, dan berat), Munisi (Kaliber Besar, Kecil, Khusus), Bom, Panser (Anoa, Komodo, Harimau Medium Tank, Water Canon, Badak, Sanca)	<i>Lead integrator cluster industri pertahanan sub-cluster kendaraan tempur dan senjata</i>
<b>PT. PAL</b>	Kapal FPB-28, FPB-38, FPB-57, Kapal Cepat Rudal 60, Kapal Landing Platform Dock (LPD), Kapal <i>Strategic Sealift Vessel</i> 123 M, Kapal Bantu Rumah Sakit, Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 105 M, Kapal Selam Nagapasa <i>Class</i> 1500 Ton, Kapal Niaga s.d 50.000 DWT	<i>Lead integrator untuk cluster industri pertahanan kapal kombatan, sub-cluster kapal perang atas air dan kapal selam</i>

Sumber: PT Dirgantara, PT Pindad, PT Pal (diolah)

- b. Industri komponen utama dan/atau penunjang, merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen atau suku cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dan/atau wahana (*platform*) sistem alat utama sistem senjata

**Tabel 2. BUMN Industri Komponen Utama dan Penunjang**

Industri Pertahanan	Kemampuan Produksi	Keterangan
<b>PT. Dahana</b>	Bahan Peledak (Militer & Komersil)	Bergerak di bidang industri strategis dengan produk layanan bahan peledak terintegrasi untuk sektor minyak dan gas, pertambangan umum, quarry, konstruksi, dan pertahanan
<b>PT. LEN</b>	Alkom Ranpur, <i>Surveillance, Combat Management System</i> , Listrik Tenaga Surya	Salah satu anggota BUMN klaster NDHI (National Defence and Hightech Industri) dan fokus pada teknologi elektroteknika yang mengembangkan, memproduksi dan membangun sarana & prasarana berbasis teknologi elektroteknika untuk hankam, publik dan industri.
<b>PT. INTI</b>	<i>Video Surveillance System, Next Generation Video Messaging System, Digital TV System</i>	Badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri perangkat cerdas (smart devices), aplikasi cerdas (smart application), dan integrator cerdas (smart integrator)
<b>PT. Krakatau</b>	Baja KSW 500 (tahan peluru),	Bahan baku pembuatan peralatan militer

Steel	<i>Hot/Cold Rolled Coil, Wire Road</i>	
PT. INKA	Gerbong Penumpang & Barang	Industri penunjang
PT. Bharata Indonesia	<i>Bomb Basket, Sharp Bomb F-16</i> dan alatalat berat	Industri penunjang
PT. Boma Bisma Indra	Peralatan pembangkit tenaga listrik (Paiton), Kondensor, Peralatan pabrik, dsb	Industri penunjang
PT. DOK Perkapalan Kodja Bahari	Kapal LCT, LCU, Repowering KRI	<i>Core business</i> di bidang industri perkapalan, khususnya di bidang perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal, alat apung dan konstruksi bangunan lepas pantai, serta jasa-jasa penunjang lainnya.
PT. DOK Perkapalan Surabaya	Kapal LCT, LCU, <i>Repowering</i> KRI	Industri penunjang
PT. Industri Kapal Indonesia	Kapal Patroli, Kapal Kargo, Kapal Ikan, Kapal Tunda	Industri penunjang

- c. Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi suku cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau yang menghasilkan produk perbekalan.
- d. Industri bahan baku, merupakan badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta yang memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan)

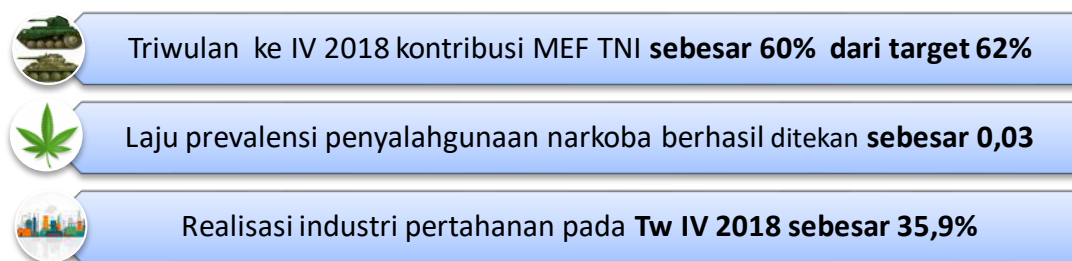
### Capaian dan Target pembangunan Industri Pertahanan

Salah satu dari 7 agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024, yakni memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, melalui peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan, termasuk pertahanan dan industri pertahanan. Industri pertahanan sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dinilai belum optimal. Beberapa kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) sudah mampu dipenuhi oleh industri pertahanan. Namun, untuk beberapa jenis alutsista strategis seperti: pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAV), dan radar masih mengandalkan produksi luar negeri. Penguasaan teknologi kunci, kemampuan integrasi sistem,

dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alpalhankam. Dengan demikian industri pertahanan dapat meningkatkan daya saing internasional sekaligus menjadi bagian dari global *supply chain*.

Dilihat dari pencapaian target tiga sasaran pokok pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yaitu pencapaian Minimum Essential Force (MEF), kontribusi industri dalam negeri terhadap industri pertahanan, dan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba. Hingga triwulan ke IV 2018 capaian MEF TNI sudah pada *on track* yaitu sebesar 60 persen dari target sebesar 62 persen yang diperkirakan akan tercapai pada tahun 2019. Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba yang diprediksi meningkat sebesar 0,05 persen berhasil ditekan hingga 0,03 persen. Sementara itu, kontribusi industri pertahanan nasional diperkirakan sulit tercapai karena realisasi baru sebesar 35,9 persen dari target sebesar 49 persen.

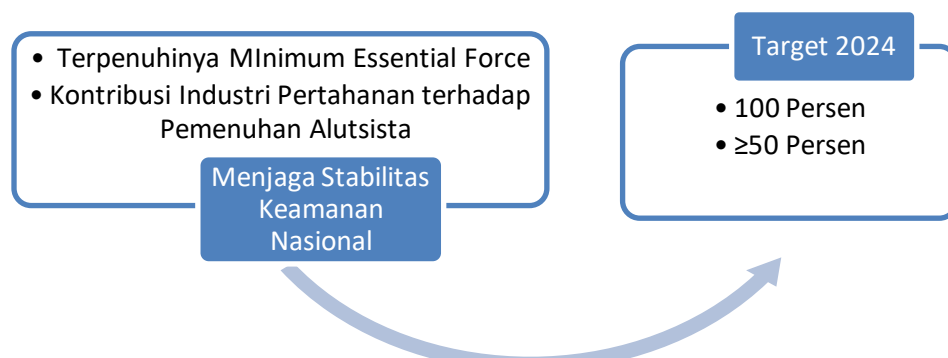
**Gambar 1. Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan**



Sumber: RPJMN 2020-2024

Kemudian dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas polhukhankam yang sehubungan dengan Industri Pertahanan ditetapkan sasaran, target, dan indikator sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024, sebagai berikut:

**Gambar 2. Sasaran, Target, dan Indikator Industri Pertahanan**



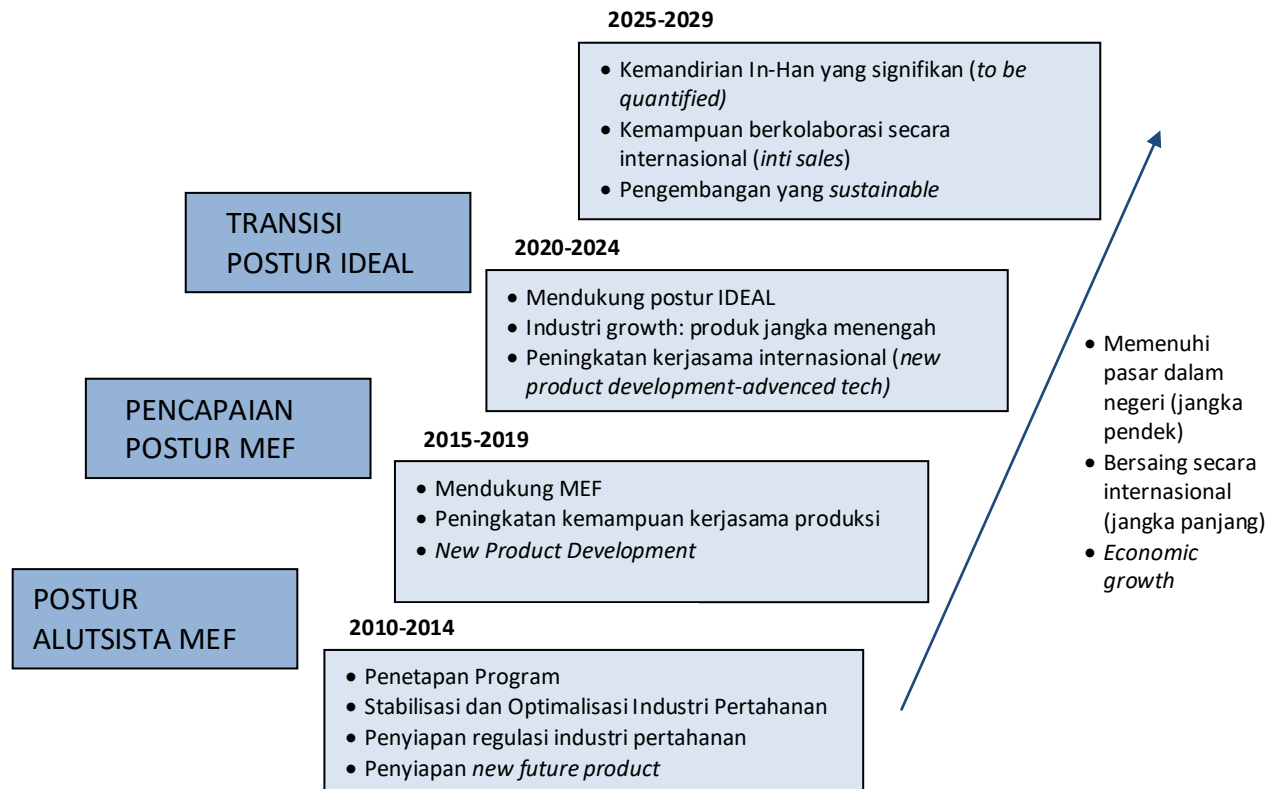
Sumber: RPJMN 2020-2024, diolah

Sementara dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan, pemerintah telah merumuskan Master Plan pembangunan industri pertahanan yang dimulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2029 dimana diharapkan pada tahun tersebut akan tercapai target kemandirian



industri pertahanan yang signifikan, kemampuan berkolaborasi secara internasional dan pengembangan yang *sustainable*, sehingga Industri pertahanan mampu memenuhi pasar dalam negeri, dapat bersaing dengan produk luar negeri serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 3. Master Plan Industri Pertahanan 2010-2029**



Sumber: Kementerian Pertahanan

Perumusan Master Plan pembangunan industri pertahanan tersebut disesuaikan atau sejalan dengan target pembangunan kekuatan Alpahankam sampai dengan tahun 2029. Selain itu, juga telah disusun *road map* Pembinaan Produk Alpahankam yang dibagi dalam tiga fase yakni fase 1 Penguasaan Desain 2010-2014, fase 2 Penguasaan Teknologi 2015-2019 dan fase 3 Pengembangan Baru 2020-2025. Dalam *road map* tersebut memuat tujuh program prioritas industri pertahanan nasional yaitu Propelan, Roket, Rudal, Medium Tank, Radar, Kapal Selam dan Pesawat Tempur. Tiga dari tujuh Program Prioritas Nasional telah mencapai hasil yang menggembirakan yaitu Medium Tank Harimau, Kapal Selam dan Roket RHan-122B. (Yanto, 2019).



Gambar 4. Program Prioritas Industri Pertahanan



Sumber: KKIP

### Industri Pertahanan dalam Lingkup Ekonomi

Berdasarkan data Kemenhan, sampai dengan tahun 2019, terdapat 9 industri pertahanan BUMN, yakni PT. Pindad (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), PT. Len Industri, PT. Dahana, PT. Dok Kodja Bahari (PT. DKB), PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT. INTI), PT. Garuda Maintenance Facility (GMF), dan PT. Merpati Maintenance Facility (PT. MMF). Dari 9 Industri BUMN, 3 (tiga) diantaranya telah ditetapkan sebagai *Lead integrator* (Pemadu Moda) untuk Alutsista sesuai matra yaitu : PT. PAL untuk Alutsista Matra Laut, PT. DI untuk Alutsista Matra Udara dan PT. Pindad untuk Alutsista Matra Darat. Sementara Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bergerak di sektor pertahanan Indonesia sebanyak 101 perusahaan dengan berbagai macam kompetensi dan berperan sebagai Indhan pada tier 2 hingga tier 4. Namun dari total tersebut, hanya separuh yang aktif atau sebesar 54 perusahaan. Dari jumlah tersebut, jika ditotal BUMN dan BUMS memiliki aset sekitar Rp17,3 triliun. (alinea, 2019)

Kemudian berdasarkan hasil inventarisasi Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas), dimana Pinhantanas bertindak sebagai payung bagi badan usaha milik swasta penyedia alpalhankam, bahwa terdapat 81 pelaku swasta yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam) dalam negeri. Mulai dari pabrik pembuat kapal di Tanjung Priok, pembuat radio komunikasi, sistem manajemen perang, hingga bom untuk pesawat tempur. (Sindonews, 2018)

Hasil industri pertahanan selain di produksi untuk kebutuhan dalam negeri, juga dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan luar negeri. Tercatat nilai transaksi ekspor yang dibukukan sejak tahun 2015-2018 mencapai USD284,1 Juta, dimana jumlah ekspor sebesar USD161 juta berasal

dari PT Dirgantara Indonesia melalui penjualan pesawat angkut type CN-235 dan NC-212 ke negara Senegal, Vietnam, dan Thailand. Sebesar USD86,9 juta berasal dari PT PAL melalui berasal dari PT Lundin melalui penjualan kapal patroli berukuran kecil ke Swedia dan Rusia.

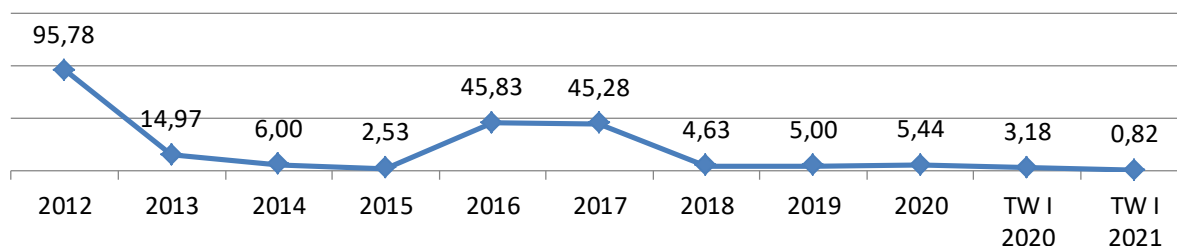
**Gambar 5. Ekspor Industri Pertahanan Indonesia Periode Penjualan 2015-2018**



Sumber: KKIP, 2020

Kemudian berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI (Kemendag RI) (2021), menunjukkan bahwa ekspor alutsista<sup>1</sup> sepanjang tahun 2012 hingga 2020 mengalami fluktuatif, dimana tahun 2013 menjadi tahun dengan penurunan ekspor terbesar. Sementara pada triwulan 1 2021, tercatat bahwa jumlah ekspor sebesar USD0,82 juta jauh lebih rendah dari periode yang sama (triwulan 1 - 2020) tahun sebelumnya yakni sebesar USD3,18 juta (gambar 6).

**Gambar 6. Perkembangan Total Ekspor Alutsista Tahun 2012-2021 (Juta USD)**



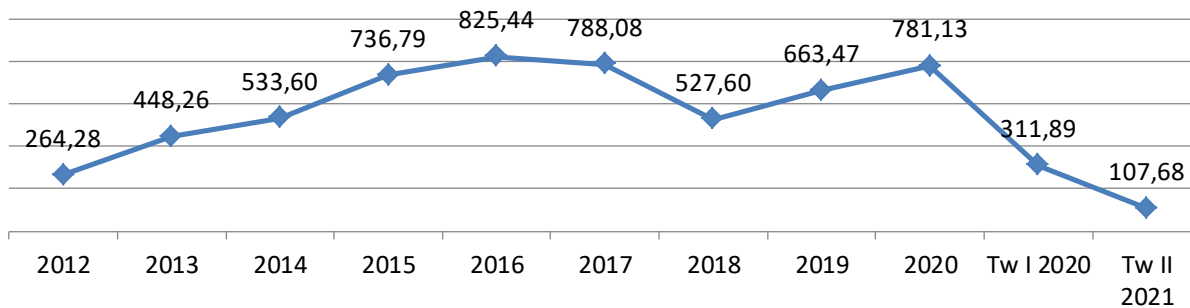
Sumber: Kementerian Perdagangan RI (2021)

Disisi impor, sepanjang tahun 2012 hingga 2020 berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI (Kemendag RI) (2021) menunjukkan bahwa terdapat tren kecenderungan peningkatan impor kebutuhan alutsista<sup>2</sup>. Sementara pada triwulan 1 - 2021, Impor alutsista mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (gambar 7).

<sup>1</sup>Jumlah Ekspor alutsista yang terdiri atas Senjata dan amunisi; bagian dan aksesorisnya; tank; kapal perang; tidak termasuk pesawat ataupun helikopter (Kode HS 93, 8710, 8805, 8906, 8804)

<sup>2</sup> Idem

**Gambar 7. Perkembangan Total Impor Alutsista Tahun 2012-2021 (Juta USD)**



Sumber: Kementerian Perdagangan RI (2021)

Sementara berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2020), bahwa selama tahun 2015-2019, Indonesia rata-rata berada pada posisi 17 negara impor terbesar alutsista, yakni sebesar 1,8 persen dari total dunia. Pemasok alutsista didominasi oleh negara Amerika (20 persen), belanda(18 persen), dan korea (16 persen ) dari keseluruhan total impor alutsista.

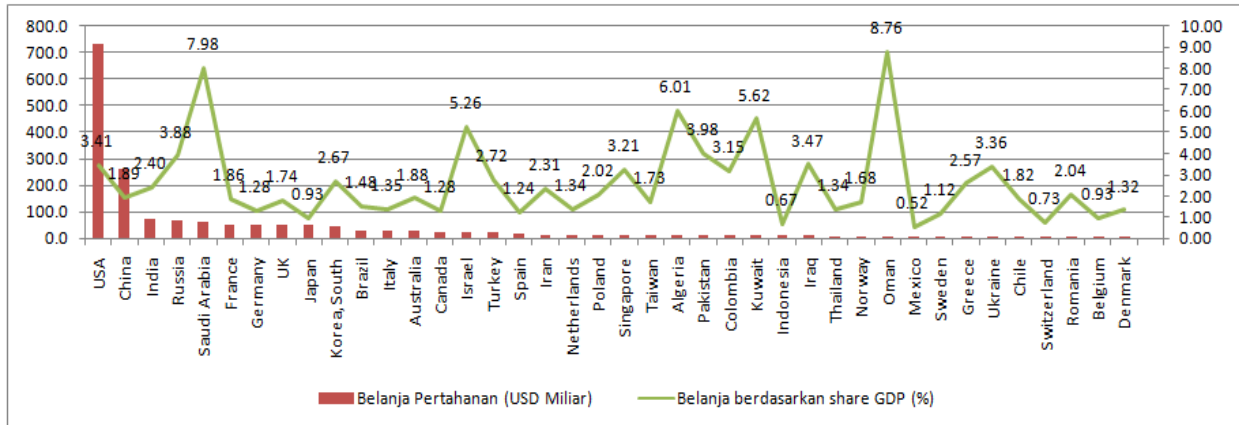
**Tabel 3. Importir Terbesar di Dunia dan Pemasok Utama Alutsista, 2015–2019**

No	Importer	Share of arms imports (%)		Per cent change from 2010–14 to 2015–19 <sup>a</sup>	Main suppliers (share of importer's total imports, %), 2015–19		
		2015–19	2010–14		1st	2nd	3rd
1	Saudi Arabia	12	5,6	130	USA (73)	UK (13)	France (4,3)
2	India	9,2	14	-32	Russia (56)	Israel (14)	France (12)
3	Egypt	5,8	1,9	212	France (35)	Russia (34)	USA (15)
4	Australia	4,9	3,7	40	USA (68)	Spain (21)	France (3,6)
5	China	4,3	4,4	3,3	Russia (76)	France (8,8)	Ukraine (6,9)
6	Algeria	4,2	2,6	71	Russia (67)	China (13)	Germany (11)
7	South Korea	3,4	3,5	3,3	USA (55)	Germany (30)	Spain (7,8)
8	UAE	3,4	4,4	-18	USA (68)	France (11)	Netherlands (3,4)
9	Iraq	3,4	1,8	98	USA (45)	Russia (34)	South Korea (8,6)
10	Qatar	3,4	0,5	631	USA (50)	France (34)	Germany (9,2)
11	Pakistan	2,6	4,5	-39	China (73)	Russia (6,6)	Italy (6,1)
12	Viet Nam	2,2	2,6	-9,3	Russia (74)	Israel (12)	Belarus (4,9)
13	United States	2,0	3,3	-37	Germany (21)	UK (17)	Netherlands (13)
14	Israel	2,0	0,7	181	USA (78)	Germany (16)	Italy (6,2)
15	Turkey	1,8	3,7	-48	USA (38)	Italy (24)	Spain (19)
16	Japan	1,8	1,1	72	USA (96)	UK (2,4)	Sweden (1,6)
17	Indonesia	1,8	1,9	-4,6	USA (20)	Netherlands (18)	South Korea (16)
18	United Kingdom	1,7	1,5	17	USA (67)	South Korea (21)	Germany (4,7)
19	Singapore	1,7	2,5	-29	USA (37)	Spain (24)	France (18)
20	Bangladesh	1,6	0,9	93	China (72)	Russia (15)	UK (2,4)

Sumber: SIPRI (2020)

Negara dengan Industri pertahanan yang maju juga didukung dan memiliki anggaran pertahanan yang besar, dan idealnya 20-30 persen anggaran pertahanan di alokasikan untuk industri pertahanan. (Karim, 2020). Namun sayangnya dukungan anggaran belanja pertahanan Indonesia masih relatif kecil. Berdasarkan data SIPRI (2020), belanja pertahanan Indonesia sebesar USD7,7 miliar atau 0,67 persen dari GDP pada tahun 2019. Atas belanja pertahanan tersebut menempatkan Indonesia berada diperingkat 27 dunia.

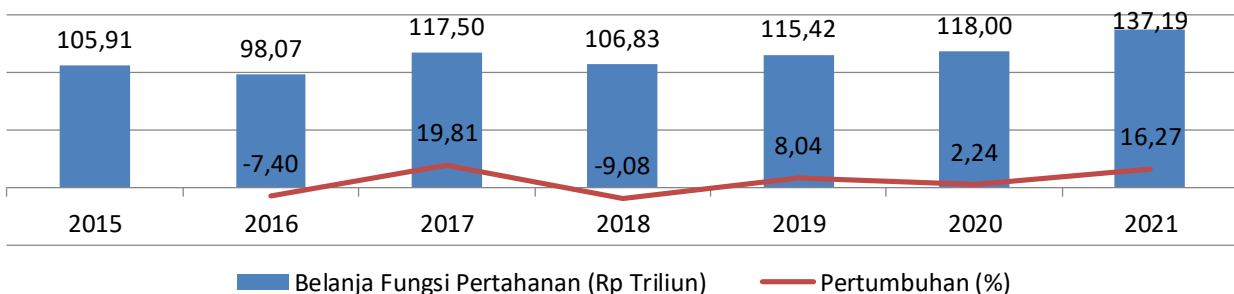
**Gambar 8. Empat Puluh Negara dengan Belanja Pertahanan Terbesar di Dunia Tahun 2019**



Sumber: SIPRI (2020), diolah

Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi anggaran fungsi pertahanan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,8 persen, yaitu dari Rp105,91 triliun dalam tahun 2015 menjadi Rp115,42 triliun pada tahun 2019. Anggaran fungsi pertahanan dalam periode 2015–2019 direalisasikan antara lain melalui: (1) Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Darat; (2) Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif; (3) Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat; (4) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut; (5) Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara; (6) Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Laut; dan (7) Program Penelitian dan Pengembangan Kemhan.

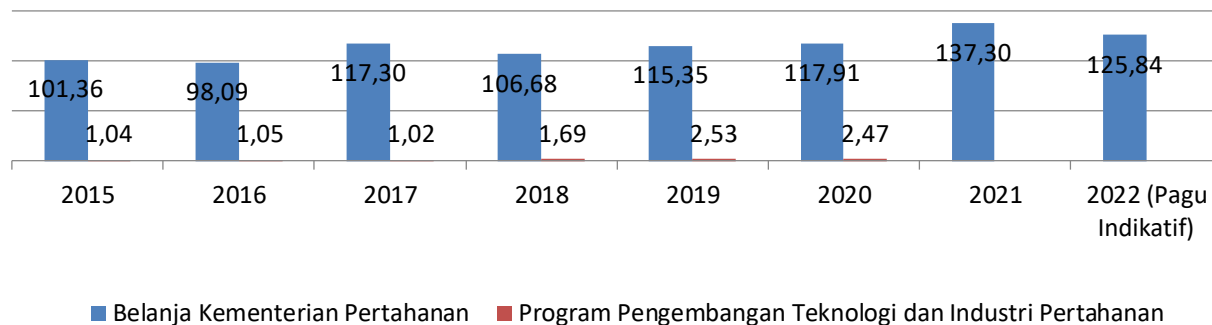
**Gambar9. Perkembangan Belanja Fungsi Pertahanan**



Sumber: LKPP berbagai tahun dan Nota Keuangan 2021

Dalam kurun waktu yang sama (2015-2019), realisasi belanja kementerian pertahanan juga mengalami pertumbuhan, dengan rata-rata yakni sebesar 3,85 persen, begitupun dengan program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan dalam rangka mendukung Industri pertahanan dilingkup Kementerian Pertahanan, yakni rata-rata realisasi sepanjang tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 28,25 persen.

**Gambar 10. Perkembangan Belanja Kementerian Pertahanan dan Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan (Rp Triliun)**



Sumber: LKPP berbagai tahun, Perpres Nomor 113 Tahun 2020, KEM PPKF

Pada tahun 2021, anggaran fungsi pertahanan dialokasikan sebesar Rp137,19 triliun atau meningkat 16,27 persen terhadap tahun sebelumnya 2020, sementara alokasi untuk Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2021 yakni sebesar Rp137,29 triliun atau meningkat 16,44 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian Berdasarkan KEM PPKF 2022, Pagu Indikatif Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp125,84 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan, melalui pelaksanaan program-program seperti: (1) Program Pelaksanaan Tugas TNI, (2) Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarana dan Prasarana Pertahanan, (3) Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan, (4) Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit, (5) Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan, (6) Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan, dan (7) Program Dukungan Manajemen. Adapun beberapa target output prioritas Kementerian Pertahanan pada tahun 2022 dan perkembangan target output dan capaian pada tahun sebelumnya, sebagai berikut:

**Tabel 4. Matrik Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas**

Output Prioritas	Capaian (Realisasi) 2016 - 2019				Target		
	2016	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022 (Pagu Indikatif)
Pengadaan amunisi kaliber kecil (butir)	7.630.294	2.666.432	3.631.805	235.717	13 (kegiatan)	13 (kegiatan)	13 (kegiatan)
Alpung, Kri, Kal, dan Ranpur/Rantis Matra Laut (unit)	11	28	2	12	14	14	6
Pengadaan/ penggantian kendaraan tempur	24	14	3	18	12	12	9
Dukungan Pengadaan Alutsista (paket)	35	11	2	1	5	5	2
Pengadaan/ penggantian pesawat udara	20	4	4	4	4	4	3
Dukungan Badan Cadangan Logistik Strategis (BCLS)							1

Sumber: RKA K/L TA 2021, KEM PPKF 2022

target output prioritas Kemhan pada TA 2022, jika dibandingkan dengan target ataupun capaian pada periode sebelumnya, target pada TA 2022 tersebut mengalami penurunan. Disisi lain, terdapat penambahan target output prioritas baru yakni dukungan badan cadangan logistik strategis sebanyak 1 unit.

## Kesimpulan

Industri pertahanan Indonesia dinilai belum optimal, sebagaimana tergambar dalam capaian RPJMN. Impor industri pertahanan juga dinilai masih cukup besar, dimana Indonesia juga menjadi salah satu importir terbesar di dunia. Sementara jumlah ekspor Indonesia juga masih perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan persaingan. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk mampu mandiri dalam industri pertahanan dan berdaya saing di tingkat Internasional. Hal tersebut dapat terwujud salah satunya melalui dukungan anggaran.

## Daftar Pustaka

Bappenas. RPJMN 2020-2024

KKIP. 2018. Direktori Industri Pertahanan Indonesia 2018-2019

KKIP. 2020. 6 Strategi Membangun Daya Saing Industri Pertahanan Indonesia di Pasar Internasional, diakses dari <https://www.kkip.go.id/2020/05/11/6-strategi-membangun-daya-saing-industri-pertahanan-indonesia-di-pasar-internasional-1/#>

Kompas. 2020. Industri Pertahanan: Sejarah, Perkembangan dan Tantangan, diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/industri-pertahanan-sejarah-perkembangan-dan-tantangan>

Kumparan. 2020. Impor Senjata RI Salah Satu yang Terbesar di Dunia-dan Diminta Jokowi Direm, diakses dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/impor-senjata-ri-salah-satu-yang-terbesar-di-dunia-dan-diminta-jokowi-direm-1tmi7FsxgFr/full>

LIPI. 2012. Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia

Silmy, Karim. 2020. Membangun Industri Strategis dan Industri Pertahanan, Seberapa Seriuskah Kita?. Disampaikan pada Acara Diskusi ke-72 Sekolah Kebijakan Publik – Institut Harkat Negeri dengan Judul , pada 1 Juli 2020

Sindonews. 2018. Pengusaha Swasta Nasional Pamerkan Produk Industri Pertahanan, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1283913/14/pengusaha-swasta-nasional-pamerkan-produk-industri-pertahanan>

Stockholm International Peace Institute (SIPRI). SIPRI Databases, diakses dari <https://www.sipri.org/databases>

Yanto, Sri. 2019. Mewujudkan Industri Pertahanan Yang Kuat, Mandiri Dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Mef) Tni. Wira: Media Informasi Kementerian Pertahanan. Edisi Khusus 2019:Hal44

Alinea. 2019. Aset perusahaan sektor pertahanan hanya 17,3 Triliun, diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/hanya-54-perusahaan-pertahanan-yang-aktif-saat-ini-dari-102-b1XpL9oQH>, 26 Maret 2021








**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT  
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635

[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

 [puskajianggaran](https://www.instagram.com/puskajianggaran)

EMAIL: [puskaji.anggaran@dpr.go.id](mailto:puskaji.anggaran@dpr.go.id)